

Pembinaan yang dilaksanakan melalui sistem formal akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Mukim. Di samping itu pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi, pelatihan kewirausahaan perlu dilakukan oleh pemerintahan daerah cara langsung turun ke *gampong-gampong/mukim-mukim* untuk mengajak masyarakat supaya lebih mandiri dalam berusaha/berkarya dan untuk meningkatkan pendapatan dan standarisasi layak hidup, pembinaan seperti ini dapat dilakukan pemerintahan daerah melalui instansi/dinas terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pembinaan yang diharapkan masyarakat bukan saja pada saat proyek digulirkan dalam masyarakat, tetapi adanya pengawasan yang rutin oleh pihak Pemerintahan daerah sampai masyarakat benar-benar mandiri. Dan jika mengalami proyek tersebut gagal, maka pemerintahan daerah akan segera mengetahui kendala apa yang menyebabkan proyek tersebut gagal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad, Zakaria, *Sekitar Kerajaan Atjeh dalam Tahun 1520-1575*, Monora, Medan, 1972,
2. Alfian, Ibrahim, wajah *Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1999
3. -----, *Perang di Jalan Allah (Perang Aceh 1873-1912)*, PT. New Aqua Press, 1987
4. -----, *Segi-segi Sosial Masyarakat Aceh*, Lembaga penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1977.

5. Chamty, James, *Managemen Rekayasa Ulang* (alih bahasa: Agus Maulana), Binarupa Aksara, Jakarta, 1996
6. Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2001.
7. Gaffar, Afan, *Politik Indonesia, Transisi menuju Demokrasi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2000
8. Ganesha, Volume II, N0.3, Desember 2000, STPMD “APMD” Yogyakarta, 2000
9. Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Press, Jakarta 1992
10. Hurgronye, Snouck, *De Atjehers* (alih bahasa oleh Sutan Maimoen), *Rakyat dan Adat Istiadat Jilid I*, INIS, Jakarta, 1996
11. -----, *De Atjehers, deel I en II* (alih bahasa oleh Sutan Maimoen), *Rakyat dan Adat Istiadat Jilid II*, INIS, Jakarta, 1997
12. -----, *The Achehnese* (alih bahasa oleh Ng.Singarimbun, Sutan Maimoen dan Kustiniyati), *Aceh di Mata Klonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985
13. Imawan, Riswanda, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta 1996.
14. IRE, *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, Annual Report 2001-2002
15. J.Lexy, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung 2001
16. Jakobi, A.K, Tgk, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949, dan Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang*, Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Yayasan “Selawah Republik Indonesia 001”, Jakarta, 1998.
17. Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Pemerintah di daerah*, Aksara Baru, Jakarta 1985
18. Kontjaraningrat, *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*, Karya Unipress, Jakarta 1999
19. Kremer, J, *Atjeh II*, (alih bahasa oleh Aboe Bakar) *Masalah Rodi, Penghasilan Kepala-kepala Daerah Kenegrian dan Hukum Tanah di Aceh*, PDIA, Banda Aceh, 1978.
20. Lapera, *Otonomi Pemberian Negara* (kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi daerah) Yogyakarta 2001
21. Marjasin, *Lembaga-lembaga Adat di Pedesaan propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Kerjasama Dirjen Bandes, Unsyiah, dan APDN, Banda Aceh, 1991

22. Morgan, Michael, *Atrategi Inovasi Sumber Daya Manusia (Creating Workfocer Innovation)*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996
23. Najib, Mohammad dan Kawan-kawan, *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*, LKPSM, Yogyakarta, 1996
24. Ndara, Taliziduhu, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta 1997.
25. Nur, Ilyas Edy, *Keberadaan Desa dan Mukim pada Zaman Kerajaan Aceh, Zaman penjajahan dan Zaman Kemerdekaan di Aceh Besar*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1996
26. Satari, G dan Kedi Suradisastra dalam Seminar Nasional *Upaya peningkatan Pendidikan dalam pengentasan Kemiskinan pada Desa Tertinggal* yang diselenggarakan di IKIP Bandung, 24-26 Oktober 1994
27. Sedarmayanti, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan Ditinjau dari Aspek Essensial dan Actual*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000
28. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Motode penelitian Survai*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, cetakan kedua, 1995
29. Singarimbun. Ng, (et.al), *Pemerintahan Desa*, laporan penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Kerja sama dengan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1988.
30. Siwu, Richard A.D, *Keadilan dalam Kemajemukan*, Sinar Agape Press, Jakarta, 1998
31. Soekanto, Soerjono, *sosiologi suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000
32. Sufi, Rusdi, *Pahlawan Nasional Iskandar Muda*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direjen Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta 1995
33. Sujamto, *Daerah Istimewa Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bina Aksara, 1988.
34. Sulaiman, *kepemimpinan Imeum Mukim dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Aceh, (tesis)*, Bandung, 2000.
35. Suny, Ismail, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Bharata Karya Aksara, Jakarta 1980
36. Surbakti, Ramlan, *Mamahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasaran Indonesia, Jakarta, 1992.

37. Syahrizal, *Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Masalah Kewarisan di Aceh (Disertasi)*, Bandung 2001.
38. Syarifuddin, Ateng, *Titik Berat Otonomi daerah pada Daerah Tk.II dan perkembangan*, Mondar Maju. 1991
39. Syah, Kaoy dan Luman Hakiem, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah (proses pembentukan UU.No.44/1999)*, Pengurus Besar Al Jam'Iyatul Washliyah, Jakarta
40. Wijaya, HAW, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2001.
41. Roberstson, Roland, ed, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosilogis*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1993
42. Tippe, Syarifuddin, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Putera Cidesindo, jakarta 2000
43. Van Langen, K.F.H, susunan Pemerintah Aceh semasa Kesultanan, alih bahasa Aboe Bakar, pusat dokumentasi dan Informasi Aceh, seri Informasi Aceh, tahun IX No. I, 1983,.
44. Vleer, MR.A.J, Alih bahasa Aboe Bakar, *Kedudukan "Tuha Peut" dalam Sususnan pemerintahan Negeri di Aceh*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh banda Aceh, Banda Aceh, 1978.
45. Wijaya, HAW, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2001.
46. Zainuddin, H.M, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan 1961.
47. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta, 1977/1978
48. UU No. 5 /1974, Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
49. UU No. 5 /1979, Tentang Pemerintahan Desa
50. UU No.22/1999, Tentang Pemerintahan Daerah
51. UU No.44 /2000 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaa propinsi Aceh
52. UU No.18/2001, tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
53. Perda Propinsi Daerah Istimewa Aceh, N0.2/1990, Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

54. Perda Propinsi Daerah Istimewa Aceh, N0.5/1996, Tentang *Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Prop Daerah Istimewa Aceh*
55. Perda Propinsi Daerah Istimewa Aceh, N0.7/2000, Tentang *Penyelenggaraan Kehidupan Adat.*
56. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2003 Tentang *Pemerintahan Mukim .*
57. Keputusan Gubernur Kepala daerah Istimewa Aceh No.17 tahun 1997, tentang *Pedoman Pelaksanaan Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat propinsi Daerah Istimewa Aceh.*